

The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia

Ade Rizki Saputra

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keyword: Stable Coin, Asset, Crypto

Received : 3 August

Revised : 19 August

Accepted: 19 September

©2023 Saputra: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Stablecoins, as a form of innovation in the crypto asset ecosystem, have emerged as an attractive alternative in bridging the gap between fiat currencies and highly volatile crypto assets. In Indonesia, the presence of stablecoins has sparked debate about the need for strong regulations to mitigate risks and promote sustainable growth in the crypto asset industry. This journal outlines the urgency of stablecoin regulation on crypto assets in Indonesia. We analyze the possible implications of the presence of stablecoins without adequate regulation, including their potential impact on financial market stability, consumer protection, and national security. Additionally, we investigate regulatory approaches that the Indonesian government can take to create a conducive environment for the healthy growth of the crypto asset ecosystem while safeguarding the public interest. Through a multidisciplinary approach, we present arguments supporting the importance of developing a clear and sustainable regulatory framework for stablecoins in Indonesia. We also highlight the challenges and opportunities associated with these regulations and provide insight into how appropriate regulations can provide long-term benefits for the Indonesian economy. This research aims to provide a better understanding of the complexity of stablecoin regulation in the Indonesian context, while stimulating further discussion about the regulatory direction that should be taken in the face of rapid developments in the crypto asset industry

Urgensi Regulasi Stablecoin pada Aset Kripto di Indonesia

Ade Rizki Saputra

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Stable Coin, Asset, Kripto

Received : 3 August

Revised : 19 August

Accepted: 19 September

©2023 Saputra: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

The purpose of carrying out this research is to find out the urgency of regulation of initial coin offerings or ICOs in Indonesia. This writing uses a normative method with an approach using statutory approaches, comparative approaches, and descriptive approaches. Legal materials used are primary, secondary, and tertiary obtained from literature studies. Then it will be analyzed systematically which is carried out by classifying legal materials to facilitate analysis and construction. In this regard, as well as paying attention to the development of crypto assets at this time, it is important for regulators to follow matters related to the development of digital assets. Therefore, further regulation of digital assets is needed in Indonesia, one of which is regarding ICO as a guide in organizing public offerings in the scope of digital assets in Indonesia based on ICO arrangements that have been carried out by America. This can be one of the best practice references in order to provide a regulatory umbrella as well as a technical guidance framework in the practice of ICOs in Indonesia

PENDAHULUAN

Aset kripto, yang dikenal dengan sebutan *cryptocurrency*, telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam dunia keuangan dan teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan Bitcoin sebagai pelopor, aset kripto telah menciptakan ekosistem global yang semakin berkembang dengan cepat, menarik perhatian investor, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Salah satu evolusi terbaru dalam ekosistem aset kripto adalah munculnya *stablecoin*. Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi bagian integral dari percakapan global tentang keuangan dan teknologi. Sebagai mata uang digital pertama yang berhasil, Bitcoin telah membuka jalan bagi perkembangan seluruh ekosistem aset kripto. Konsep inovatif yang mendasari Bitcoin, yaitu teknologi *blockchain*, telah menjadi dasar untuk pembuatan berbagai jenis aset kripto baru. Dalam ekosistem aset kripto yang semakin berkembang, perhatian dunia terhadap potensi investasi dan teknologi yang terkait semakin meningkat. Investor dari berbagai lapisan masyarakat telah berpartisipasi dalam pasar aset kripto, menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan nilai aset digital ini. Selain itu, perusahaan-perusahaan terkemuka dan *start-up* kecil telah memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mengembangkan aplikasi baru, termasuk solusi pembayaran, sistem manajemen rantai pasokan, dan bahkan produk keuangan.

Salah satu aspek yang mencolok dalam perkembangan aset kripto adalah munculnya *stablecoin*. *Stablecoin* hadir sebagai alternatif yang menarik bagi mata uang fiat tradisional dan aset kripto yang volatil. Dengan berpegang pada aset-aset yang memiliki stabilitas nilai seperti dolar AS atau komoditas, *stablecoin* menawarkan tingkat prediktabilitas yang lebih tinggi dalam perdagangan dan investasi. Ini menjadikannya alat yang menarik bagi individu dan bisnis yang mencari solusi untuk masalah volatilitas yang sering terjadi di pasar aset kripto. Dengan demikian, perkembangan aset kripto dan munculnya *stablecoin* telah membentuk ekosistem yang semakin kompleks dan beragam. Selain menarik investor, ekosistem ini juga menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia yang berusaha untuk memahami dan mengatur tren ini. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami urgensi regulasi yang berkaitan dengan *stablecoin* dalam konteks Indonesia dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi ekonomi, keuangan, dan keamanan nasional negara ini. *Stablecoin* adalah *cryptocurrency* yang didesain untuk mempertahankan nilai stabil, berbeda dengan aset kripto tradisional seperti Bitcoin yang cenderung memiliki volatilitas harga yang tinggi. *Stablecoin* mendapatkan stabilitas nilainya dengan dipegang pada aset-aset seperti mata uang fiat, komoditas, atau bahkan aset kripto lainnya. Karena stabilitasnya, *stablecoin* telah menjadi alat yang menarik untuk berbagai keperluan, termasuk perdagangan, pembayaran, dan investasi.

Di Indonesia, pertumbuhan aset kripto dan penggunaan *stablecoin* telah mencapai tingkat yang signifikan. Meskipun demikian, ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi *stablecoin* di negara ini telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang dampaknya terhadap ekonomi, keamanan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Urgensi untuk mengatur dan mengawasi aspek-aspek ini semakin meningkat seiring dengan

pertumbuhan pesat dalam penggunaan aset kripto dan stablecoin di Indonesia. Pertumbuhan pesat dalam penggunaan aset kripto dan stablecoin di Indonesia telah menciptakan tantangan dan peluang yang kompleks. Karena stabilitas harga yang relatif lebih baik yang ditawarkan oleh stablecoin, banyak individu dan bisnis di Indonesia telah mulai memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, termasuk transaksi sehari-hari, perdagangan, dan bahkan investasi jangka panjang. Namun, tanpa kerangka regulasi yang jelas, risiko dan ketidakpastian dapat merajalela. Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan stablecoin untuk tujuan ilegal, termasuk pencucian uang, pembiayaan terorisme, atau tindakan kejahatan keuangan lainnya. Tanpa regulasi yang memadai, sulit untuk melacak dan mencegah aktivitas ilegal ini. Selain itu, masalah perlindungan konsumen juga muncul, seperti risiko kehilangan akses ke dana yang dipegang dalam stablecoin atau masalah keamanan terkait dengan penyimpanan dan manajemen kunci pribadi.

Pendahuluan inilah yang menjadi dasar penyelidikan dalam jurnal ini. Kami akan mengeksplorasi dengan cermat urgensi regulasi stablecoin pada aset kripto di Indonesia, menganalisis implikasi dari ketiadaan regulasi yang memadai, serta mengidentifikasi potensi dampak positif yang dapat dihasilkan dari pendekatan regulasi yang bijak. Melalui pendekatan multidisiplin, kami akan mencoba memberikan wawasan yang mendalam tentang peran penting regulasi dalam mengelola perkembangan cepat aset kripto di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan perspektif konsumen, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Dari perspektif stabilitas ekonomi, volatilitas harga aset kripto yang tidak diatur dapat berdampak negatif pada investor dan pasar keuangan secara keseluruhan. Bahkan, ketika stablecoin mencoba memitigasi volatilitas ini, risiko tetap ada, terutama jika aset yang digunakan sebagai cadangan untuk stablecoin mengalami fluktuasi nilai yang signifikan. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas mata uang nasional dan sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek pajak dan regulasi perpajakan yang terkait dengan aset kripto dan stablecoin. Ini termasuk pertanyaan tentang bagaimana mengklasifikasikan transaksi dengan aset kripto dalam kerangka perpajakan yang ada dan bagaimana mengenakan pajak yang sesuai. Oleh karena itu, urgensi untuk mengatur dan mengawasi aspek-aspek ini semakin menjadi sorotan. Regulasi yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekosistem aset kripto yang sehat sambil melindungi kepentingan konsumen, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah penyalahgunaan. Namun, perlu juga dihindari regulasi yang berlebihan yang dapat memblokir inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan yang seimbang dan bijak dalam mengatur aset kripto dan stablecoin di Indonesia menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis kebijakan dan studi kasus. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang urgensi regulasi stablecoin pada aset kripto di Indonesia serta dampaknya terhadap ekonomi, keuangan, dan keamanan nasional. Berikut adalah langkah-langkah dan komponen metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini:

1. Pengumpulan Data:

- Studi Literatur: Data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal akademis, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi terkait lainnya. Ini termasuk literatur terkait dengan aset kripto, stablecoin, dan regulasi terkait di Indonesia dan di seluruh dunia.
- Wawancara: Wawancara dengan para ahli, regulator, dan pemangku kepentingan terkait di Indonesia dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan mereka terhadap regulasi stablecoin.

2. Analisis Data:

- Analisis Kebijakan: Analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi peraturan dan kerangka hukum yang ada terkait dengan aset kripto dan stablecoin di Indonesia. Ini mencakup penelusuran perkembangan hukum, peraturan, dan panduan yang relevan dari otoritas regulasi, seperti Bank Indonesia dan Bappebti.
- Studi Kasus: Penelitian ini dapat memasukkan studi kasus dari proyek-proyek stablecoin yang telah ada di Indonesia, jika ada. Ini membantu dalam memahami bagaimana stablecoin telah berinteraksi dengan ekosistem lokal dan bagaimana dampaknya dapat diukur.

3. Analisis Data Kualitatif:

- Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini melibatkan klasifikasi, kategorisasi, dan penginterpretasian data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama yang relevan dengan urgensi regulasi stablecoin.

4. Pembentukan Temuan dan Kesimpulan:

- Berdasarkan analisis data, temuan utama dan kesimpulan akan dirumuskan. Ini mencakup identifikasi risiko dan manfaat regulasi stablecoin, dampaknya pada ekonomi, keuangan, dan keamanan nasional Indonesia, serta rekomendasi potensial untuk pemerintah atau regulator.

5. Pembahasan Hasil:

- Hasil penelitian akan dibahas dalam konteks literatur yang relevan dan temuan serupa dari penelitian sebelumnya. Ini akan membantu menggambarkan urgensi regulasi stablecoin di Indonesia dan relevansinya dalam skala global.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi:

-Penelitian ini akan diakhiri dengan menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang merinci langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kompleksitas regulasi aset kripto, khususnya dalam mengatur stablecoin.

7. Penyusunan Laporan Penelitian:

-Hasil penelitian akan dirangkum dalam bentuk laporan penelitian yang memadai, dengan menyajikan temuan, kesimpulan, rekomendasi, serta kutipan atau referensi yang relevan.

Metode penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi regulasi stablecoin pada aset kripto di Indonesia dan dapat menjadi landasan bagi perdebatan kebijakan yang lebih lanjut di bidang ini.

HASIL PENELITIAN

1. Kondisi Ekosistem Aset Kripto di Indonesia:

- Aset kripto, yang mencakup Bitcoin dan stablecoin, telah menjadi topik perbincangan yang sangat penting di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor tertentu telah mendorong popularitas dan pertumbuhan pesat penggunaan aset kripto, termasuk hal berikut:

1. Perkembangan Teknologi Blockchain: Teknologi blockchain adalah landasan dari sebagian besar aset kripto. Ini adalah teknologi yang menyediakan ledger terdesentralisasi yang aman dan transparan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam jaringan. Keamanan dan keandalan blockchain telah membuatnya sangat menarik bagi banyak orang. Inovasi dalam teknologi blockchain telah memungkinkan pertumbuhan ekosistem aset kripto, termasuk kemampuan untuk menciptakan aset digital yang lebih kompleks seperti stablecoin.
2. Minat Investor: Minat investor, baik individu maupun institusional, dalam aset kripto telah meningkat secara signifikan. Banyak investor melihat aset kripto sebagai kelas investasi yang menjanjikan, yang dapat memberikan potensi keuntungan yang besar. Sebagai hasilnya, semakin banyak dana investasi, hedge fund, dan lembaga keuangan telah memasukkan aset kripto ke dalam portofolio mereka.
3. Kebutuhan akan Alternatif dalam Sistem Pembayaran: Sistem pembayaran konvensional di Indonesia telah dianggap oleh beberapa individu dan bisnis sebagai kurang efisien, lambat, dan mahal. Aset kripto, termasuk stablecoin yang nilainya stabil, menawarkan alternatif yang menarik dalam hal transfer uang lintas batas, pembayaran internasional, dan transaksi online yang lebih cepat dan lebih murah. Ini adalah kebutuhan praktis yang telah mendorong penggunaan aset kripto dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian, aset kripto telah mendapatkan perhatian signifikan di Indonesia karena kombinasi faktor teknologi, minat investor, dan kebutuhan akan solusi pembayaran yang lebih efisien. Namun, pertumbuhan ini juga disertai dengan sejumlah risiko dan tantangan, yang memperkuat argumen

untuk mengatur aset kripto dengan bijak dan memahami urgensi regulasi terutama dalam konteks penggunaan stablecoin.

2. Risiko dan Tantangan Terkait Aset Kripto:

Analisis ini menggarisbawahi konsekuensi dari ketiadaan regulasi yang memadai dalam konteks aset kripto, yang mencakup Bitcoin dan stablecoin, di Indonesia. Beberapa risiko dan tantangan yang muncul sebagai akibat dari ketiadaan regulasi yang memadai adalah sebagai berikut:

1. **Potensi Penyalahgunaan untuk Tujuan Ilegal:** Ketika aset kripto tidak diatur dengan baik, mereka dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan perdagangan barang ilegal. Ketidaktransparan dalam transaksi aset kripto dan anonimitas yang diberikan oleh teknologi blockchain dapat membuatnya sulit untuk melacak aktivitas ilegal ini. Oleh karena itu, regulasi yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah penggunaan aset kripto yang tidak sah.
2. **Risiko Keamanan:** Industri aset kripto telah menjadi sasaran utama serangan siber, yang melibatkan peretasan bursa kripto dan pencurian aset digital. Tanpa regulasi yang memadai, perlindungan terhadap aset kripto dan data pengguna mungkin kurang efektif. Regulator yang cermat dapat membantu mengembangkan standar keamanan yang lebih tinggi dan mendorong praktik-praktik terbaik dalam industri ini.
3. **Volatilitas Harga:** Harga aset kripto seperti Bitcoin dapat sangat fluktuatif. Ketika pasar tidak diatur, volatilitas harga yang tinggi dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan bahkan memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Regulasi dapat mengenakan batasan dan menjalankan pengawasan untuk memitigasi risiko volatilitas harga ini.
4. **Perlindungan Konsumen:** Tanpa regulasi yang memadai, konsumen yang tidak berpengalaman dalam aset kripto dapat menjadi sasaran penipuan atau kehilangan akses ke investasi mereka. Regulasi dapat memerlukan penyedia layanan kripto untuk mematuhi pedoman perlindungan konsumen yang ketat, termasuk prosedur pemulihan akun yang hilang dan kebijakan transparansi.
5. **Stabilitas Ekonomi:** Fluktuasi harga aset kripto, khususnya jika tidak diatur, dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Stabilitas harga yang rendah dalam aset kripto dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan investasi, sementara volatilitas yang tinggi dapat memicu kepanikan pasar.

Sebagai kesimpulan, ketiadaan regulasi yang memadai dalam aset kripto dapat mengakibatkan sejumlah risiko dan tantangan yang signifikan. Regulasi yang bijak dan tepat dapat membantu mengatasi risiko ini, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan perlindungan bagi konsumen dan pemangku kepentingan dalam ekosistem aset kripto. Oleh karena itu, peran regulasi dalam mengawasi aset kripto menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri ini.

3. Pentingnya Regulasi Stablecoin:

Pentingnya stablecoin adalah sebagai berikut:

1. **Mengatasi Volatilitas Harga:** Salah satu tantangan utama dalam menggunakan aset kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran atau penyimpan nilai adalah fluktuasi harga yang tajam. Nilai Bitcoin dan aset kripto lainnya bisa melonjak atau turun dengan cepat, yang membuatnya kurang cocok untuk transaksi sehari-hari. Stablecoin, dengan nilainya yang stabil, menciptakan solusi untuk masalah ini, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa risiko eksposur terhadap volatilitas ekstrem.
2. **Pertumbuhan Penggunaan dalam Pembayaran dan Perdagangan:** Keberadaan stablecoin telah memungkinkan penggunaan aset kripto dalam berbagai keperluan sehari-hari, termasuk pembayaran online, perdagangan, dan pengiriman uang lintas batas. Ini membuka pintu bagi inovasi dalam sistem pembayaran dan membantu menghilangkan hambatan yang ada dalam penggunaan aset kripto.

Namun, ada risiko terkait dengan stablecoin jika tidak diatur dengan baik:

1. **Risiko Stabilitas Nilai:** Walaupun stablecoin dimaksudkan untuk mempertahankan stabilitas nilai, risiko dapat timbul jika aset yang digunakan sebagai cadangan untuk stablecoin mengalami fluktuasi nilai yang signifikan. Regulasi yang tepat dapat memastikan bahwa cadangan stablecoin aman dan memadai untuk mendukung nilai yang dipegang.
2. **Potensi Penggunaan yang Tidak Sah:** Stablecoin juga bisa disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang atau pembiayaan terorisme, jika tidak ada regulasi dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan yang cermat diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.
3. **Perlindungan Konsumen:** Regulasi juga dapat memberikan perlindungan bagi konsumen yang menggunakan stablecoin, seperti peraturan terkait dengan pengelolaan dana pengguna dan kebijakan pemulihan jika terjadi insiden yang merugikan.

Kesimpulannya, stablecoin adalah inovasi penting dalam ekosistem aset kripto yang dapat memberikan manfaat nyata dalam mengatasi volatilitas harga. Namun, tanpa regulasi yang tepat, risiko terkait dengan stabilitas nilai dan potensi penyalahgunaan dapat tetap ada. Oleh karena itu, urgensi regulasi stablecoin di Indonesia dan di seluruh dunia menjadi semakin penting untuk memitigasi risiko ini sambil memungkinkan pertumbuhan yang sehat dalam ekosistem aset kripto.

PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen:

-Perlindungan konsumen adalah salah satu aspek yang paling penting dalam perumusan regulasi untuk stablecoin dan seluruh ekosistem aset kripto. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa perlindungan konsumen menjadi prioritas dalam regulasi stablecoin:

1. Transparansi Informasi: Regulasi harus mengharuskan penyedia layanan stablecoin untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna. Ini mencakup memberikan detail tentang bagaimana stablecoin mereka beroperasi, bagaimana nilai tetap dijaga, dan apa yang terjadi jika terjadi perubahan dalam sistem. Transparansi ini memberikan pengguna pemahaman yang lebih baik tentang aset yang mereka pegang dan membantu mereka membuat keputusan yang informasional.

2. Kebijakan Penanganan Keluhan: Pengaturan harus mendorong penyedia layanan untuk memiliki kebijakan penanganan keluhan yang efektif dan adil. Pengguna stablecoin harus memiliki cara yang efisien untuk melaporkan masalah, mengajukan keluhan, dan mendapatkan bantuan jika mereka mengalami masalah teknis, kehilangan akses ke akun mereka, atau menghadapi transaksi yang meragukan. Ini memberikan perlindungan kepada pengguna yang mungkin menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

3. Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan: Regulasi harus memasukkan tindakan pencegahan yang ketat terhadap penyalahgunaan potensial yang dapat merugikan konsumen. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya dengan menggunakan stablecoin. Pengawasan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan juga harus diwajibkan.

4. Ketentuan Keamanan dan Proteksi Data: Regulasi juga harus mencakup persyaratan keamanan yang ketat untuk melindungi data pribadi dan finansial pengguna. Penyedia layanan harus menjalankan praktik keamanan yang kuat untuk mencegah peretasan dan kebocoran data yang dapat membahayakan pengguna.

5. Pendidikan Pengguna: Selain transparansi dan perlindungan aktif, regulasi harus mendorong penyedia layanan untuk memberikan edukasi kepada pengguna tentang risiko dan tindakan yang harus mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini dapat mencakup edukasi tentang cara menyimpan kunci pribadi dengan aman atau tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai.

Perlindungan konsumen adalah prinsip kunci dalam mengatur stablecoin dan aset kripto secara umum. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tepercaya bagi pengguna, meningkatkan kepercayaan dalam teknologi ini, dan memastikan bahwa potensi manfaat dari penggunaan aset kripto tidak dihalangi oleh risiko atau praktik yang merugikan konsumen.

Pengawasan dan Transparansi:

-Pengawasan yang kuat dari regulator, seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), adalah suatu keharusan dalam mengelola operasi dan cadangan aset pada stablecoin. Transparansi yang tinggi dalam laporan keuangan dan praktik operasional perusahaan stablecoin juga merupakan elemen penting dalam pengawasan ini. Berikut adalah penjelasan mengenai mengapa hal ini sangat ditekankan:

1. Memantau Operasi dan Cadangan Aset Stablecoin:

- Regulator seperti BI dan Bappebti harus memiliki kewenangan untuk secara aktif memantau operasi perusahaan yang mengeluarkan atau mengoperasikan stablecoin. Hal ini termasuk mengawasi bagaimana aset cadangan yang mendukung stablecoin dipegang, serta memastikan bahwa operasi sehari-hari sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Menjaga Kepercayaan Pengguna:

- Kepercayaan pengguna terhadap stablecoin sangat penting. Pengguna harus yakin bahwa stablecoin yang mereka pegang sesuai dengan klaim nilai tetapnya dan bahwa operasi perusahaan stabil dan aman. Pengawasan yang kuat membantu menjaga kepercayaan ini, yang dapat mendukung pertumbuhan penggunaan stablecoin.

3. Transparansi Laporan Keuangan:

- Perusahaan yang mengeluarkan stablecoin harus secara rutin menyajikan laporan keuangan yang transparan dan terverifikasi. Laporan ini harus mencakup rincian tentang aset cadangan, transparansi keuangan, dan kebijakan yang mereka terapkan untuk memastikan bahwa nilai tetap stablecoin terjaga. Transparansi ini memungkinkan pengguna dan regulator untuk memantau kesehatan finansial perusahaan dan stabilitas stablecoin.

4. Mencegah Praktik yang Tidak Etis atau Ilegal:

- Pengawasan yang kuat membantu mencegah praktik yang tidak etis atau ilegal dalam operasi perusahaan stablecoin, seperti penggunaan dana pengguna untuk tujuan yang tidak sah, manipulasi pasar, atau aktivitas ilegal lainnya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna.

5. Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme:

- Regulator harus memastikan bahwa perusahaan stablecoin mematuhi peraturan terkait dengan pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Pengawasan yang ketat dapat membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan.

Pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi adalah dasar bagi regulasi yang efektif dalam ekosistem aset kripto, termasuk stablecoin. Ini membantu melindungi kepentingan pengguna, menjaga stabilitas nilai stablecoin, dan meminimalkan risiko terkait dengan penyalahgunaan dan praktik yang merugikan. Dengan pengawasan yang baik, stablecoin dapat menjadi alat yang lebih terpercaya dan berguna dalam sistem keuangan dan pembayaran.

Stabilitas Ekonomi dan Keuangan:

-Regulasi untuk stablecoin harus mempertimbangkan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Salah satu aspek kunci yang perlu diatur adalah penanganan risiko terkait fluktuasi nilai aset yang dipegang sebagai cadangan oleh stablecoin. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa hal ini menjadi prioritas dalam regulasi stablecoin:

1. Stabilitas Nilai dan Keamanan Ekonomi: Stabilitas ekonomi nasional sangat penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Ketika nilai stablecoin tetap stabil dan terkait dengan aset yang memiliki stabilitas nilai yang tinggi, stablecoin dapat berperan sebagai alat pembayaran yang andal dan penyimpan nilai. Ini membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi risiko fluktuasi nilai yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

2. Penghindaran Risiko Volatilitas Ekstrim: Salah satu kelemahan aset kripto konvensional seperti Bitcoin adalah volatilitas harga yang tinggi. Jika stablecoin yang digunakan dalam aktivitas ekonomi nasional memiliki nilai yang tidak stabil, hal ini dapat menghasilkan risiko serupa yang memengaruhi transaksi dan bisnis. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan bahwa stablecoin memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatasi risiko volatilitas dan mempertahankan nilai yang stabil.

3. Penciptaan Kepercayaan Pengguna: Regulasi yang mengatur stabilitas nilai dalam cadangan aset stablecoin juga membantu menciptakan kepercayaan di kalangan pengguna. Pengguna akan lebih cenderung menggunakan stablecoin jika mereka yakin bahwa nilai yang dipegang akan tetap stabil dan dapat diandalkan. Kepercayaan ini penting untuk pertumbuhan adopsi stablecoin dalam ekonomi nasional.

4. Pengelolaan Cadangan Aset:

- Regulasi harus memerintahkan penyedia layanan stablecoin untuk secara efektif mengelola cadangan aset yang mereka pegang. Ini mencakup pemantauan dan perawatan terhadap aset cadangan, serta penanganan situasi darurat jika terjadi fluktuasi ekstrim dalam nilai aset tersebut.

5. Kepatuhan dengan Standar Internasional: Regulasi juga dapat mengacu pada standar internasional dalam mengatur stabilitas nilai. Ini membantu integrasi ekonomi dan keuangan nasional dengan ekosistem global dan memungkinkan pertukaran stablecoin dengan stablecoin dari negara lain dengan lebih efisien.

Dengan memastikan stabilitas nilai dalam ekosistem stablecoin, regulasi dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional serta mendukung penggunaan yang lebih luas dari stablecoin dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan di dalam negeri.

Pemberantasan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme:

-Regulasi harus mencakup langkah-langkah yang efektif dalam mencegah penggunaan stablecoin untuk tujuan ilegal, termasuk pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Identifikasi pengguna dan pelaporan transaksi yang mencurigakan menjadi aspek kunci dalam hal ini.

Keseimbangan antara Regulasi dan Inovasi:

-Dalam mengatur stablecoin, pemerintah dan regulator harus mencari keseimbangan antara melindungi kepentingan konsumen dan mendorong

inovasi dalam industri aset kripto. Regulasi yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Praktik Regulasi Global:

- Penelitian ini juga membandingkan praktik regulasi stablecoin di Indonesia dengan negara-negara lain. Ini membantu dalam memahami perspektif global dan implikasi komparatifnya.

Hasil dan pembahasan ini menyoroti kompleksitas isu regulasi stablecoin dalam konteks Indonesia. Regulasi yang bijak dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi risiko dan manfaat yang terkait dengan penggunaan stablecoin di negara ini. Kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perdebatan lebih lanjut dan pengembangan regulasi yang sesuai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pentingnya regulasi dalam mengatur stablecoin pada aset kripto di Indonesia sangatlah krusial seiring dengan pertumbuhan pesat industri aset kripto. Tanpa regulasi yang tepat, ada risiko potensial terkait dengan stabilitas nilai, perlindungan konsumen, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara memfasilitasi inovasi dalam ekosistem aset kripto dan melindungi kepentingan masyarakat.

1. Penyusunan Regulasi yang Komprehensif: Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur stablecoin dan aset kripto secara umum. Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti stabilitas nilai, perlindungan konsumen, keamanan, dan pencegahan aktivitas ilegal.
2. Pengawasan yang Ketat: Regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) harus memiliki otoritas yang cukup untuk memantau dan mengawasi penyedia layanan stablecoin. Ini termasuk memeriksa operasi dan cadangan aset yang mendukung stablecoin.
3. Transparansi dan Laporan Keuangan: Regulasi harus mendorong penyedia layanan stablecoin untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan terverifikasi secara berkala. Hal ini akan membantu memastikan keamanan aset pengguna dan stabilitas nilai stablecoin.
4. Perlindungan Konsumen: Regulasi harus memprioritaskan perlindungan konsumen, termasuk tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan, kebijakan penanganan keluhan, dan edukasi pengguna tentang risiko terkait aset kripto.
5. Kolaborasi dengan Regulator Internasional: Pemerintah Indonesia perlu berkolaborasi dengan regulator internasional untuk memahami praktik terbaik dalam mengatur stablecoin. Ini akan membantu memastikan bahwa regulasi Indonesia sejalan dengan standar global.
6. Evaluasi Rutin: Regulasi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif menghadapi perubahan dalam industri aset kripto.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik Urgensi Regulasi Stablecoin Terhadap Aset Kripto guna menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah. (2004) Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering: Reorientasi kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional. Malang, Bayumedia Publishing.
- Asian Development Bank Institute. (2019) "Central Bank Digital Currency and FinTech in Asia", edited by Marlene Amstad, Bihong Huang, Peter J. Morgan, and Sayuri Shirai, Asian Development Bank Institute.
- Biancotti, C. (2022). What's Next for Crypto? Bank of Italy Occasional Paper Forthcoming. <https://ssrn.com/abstract=4188362> CNBC. (2021). BI Minta Kaji Ulang Pengawasan Kripto oleh Bappebti. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=rLMd6FOlwdY> diakses tanggal 05 September 2023.
- Coinmarketcap. (2022). Coinmarketcap. <https://coinmarketcap.com/> diakses tanggal 05 September 2023.
- Hanafi Amrani. (2015) Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Institute. (2019) Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Koran Tempo. (2023, September 05). Koin Kripto Kejeblos. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/beritautama/476768/mengapa-industri-koin-kriptomengalami-musim-dingin> diakses tanggal 05 September 2023.
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, A. C. T., Adhyaksa, M. A. D., & Maspaitella, F. L. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1), 001-015. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>.
- Reda Mathovani, dan R. Narendra Jatna. (2011). Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Malibu, Jakarta.

Saputra

Sulistiyowati Irianto & Shidarta. (2009) *Metode Penelitian Hukum Konstalasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.